**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BERBASIS EDUKASI DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Muhammad Aqil Bagastomo

NPP. 30.0894

*Asdaf Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: bagastomo1999@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Sutiyo S.STP, M.Si, Ph.D

 ABSRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** One way to control forest and land fires with community empowerment can be done by providing education on prevention, extinguishing, and post-fire handling. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the community empowerment that has been carried out, to determine the supporting and inhibiting factors of empowerment, and to find out the right efforts to educate the community in handling forest and land fires in Ketapang district. **Method:** The method used is qualitative descriptive with an inductive approach, data collection is carried out by observation, interviews, and documentation. Research related to education refers to the theory proposed by Fitriani and the focus of empowerment refers to the theory proposed by Suharto. **Result:** The supporting factors of the activity are the cooperation carried out between BPBD Ketapang district and companies around fire-prone areas and the enthusiasm of the community. Meanwhile, the inhibiting factor is that the community's economy is still weak so that it becomes a pretext for the community to clear land by burning which makes education-based community empowerment less effective. **Conclusion:** Education-based community empowerment activities in handling forest and land fires in Ketapang district have been carried out but it is hoped that the Ketapang district government in this case BPBD can be more active in conducting socialization and it is expected that the Ketapang district government will emphasize more existing regulations for forest and land burning actors who are not in accordance with regulations. Keywords: Community Empowerment, Disaster Education, Handling, Forest and land fires.

**Keywords: Community Empowerement, Disaster Education, Handling, Forest and Land Fire**

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Salah satu cara pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian edukasi mengenai upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan, serta untuk mengetahui upaya yang tepat mengedukasi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ketapang. **Metode:** Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian terkait edukasi merujuk kepada teori yang dikemukakan Fitriani dan fokus pemberdayaan merujuk kepada teori yang dikemukakan Suharto. **Hasil/Temuan:** Faktor pendukung dari kegiatan tersebut yaitu kerjasama yang dilakukan antara BPBD kabupaten Ketapang dan Perusahaan sekitar daerah rawan karhutla dan antusiasme masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu ekonomi masyarakat yang masih lemah sehingga menjadi dalih masyarakat membuka lahan dengan cara membakar yang membuat pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi menjadi kurang efektif. **Kesimpulan:** Kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ketapang sudah terlaksana namun diharapkan pemerintah kabupaten ketapang dalam hal ini BPBD dapat lebih aktif melakukan sosialisasi dan diharapkan pemerintah kabupaten ketapang lebih menekankan regulasi yang ada bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Edukasi Kebencanaan, Penanganan, Kebakaran hutan dan lahan.

1. **PENDAHULUAN**
	1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, terutama hutan yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2019, Indonesia memiliki hutan seluas 94,1 juta hektar. Hutan memiliki tiga fungsi utama, yaitu konservasi, lindung, dan produksi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, kondisi hutan di Indonesia semakin buruk akibat pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban yang meningkat. Salah satu masalah serius yang sering terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan telah menarik perhatian nasional dan internasional. Dampak negatif dari kebakaran hutan termasuk kabut asap yang merugikan daerah sekitarnya, bahkan negara tetangga yang terkena dampak kabut asap. Kebakaran hutan terjadi baik karena faktor manusia maupun faktor alam. Faktor alam seperti titik panas dan kekeringan dapat memicu kebakaran, sedangkan faktor manusia melibatkan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta tindakan yang tidak disengaja seperti pembuangan sampah sembarangan.

Faktor ekonomi dan kebutuhan hidup mendorong masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar. Di Kabupaten Ketapang, yang merupakan wilayah terluas di Kalimantan Barat, pembukaan lahan dengan membakar dianggap lebih praktis dan murah. Hal ini juga dianggap sebagai tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Namun, faktor-faktor ini sering menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali di Kabupaten Ketapang.

Musim kemarau yang panjang dan pengaruh angin musim timur yang melintasi Indonesia menjadi faktor tak terhindarkan dalam kebakaran hutan. Pemerintah perlu memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Ketapang mengenai risiko kebakaran hutan. Kabupaten Ketapang memiliki luas wilayah yang banyak terdiri dari lahan gambut yang rentan terbakar setiap tahun. Kebakaran hutan dan lahan ini memiliki dampak negatif seperti pencemaran udara dan gangguan mobilitas masyarakat sekitarnya. Selain itu, kebakaran hutan juga menyebabkan kerugian ekonomi, terutama bagi petani yang mengalami gagal panen.

Untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusinya. Melibatkan masyarakat dalam pengkajian, perancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi adalah langkah penting dalam penanggulangan bencana. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena mereka adalah korban pertama yang terkena dampak bencana. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui edukasi tentang pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

* 1. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu cara pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian edukasi mengenai upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Pemberdayaan masyarakat yang pernah dilaksanakan di kabupaten Ketapang dalam menangani karhutla sejauh ini masih sebatas pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk menghimbau warga agar tidak membuka lahan dengan membakar. Pemberian pelatihan kiIat dan praktis tentang pencegahan dan pemadaman Karhutla. Diberikan peralatan standar minimal untuk dapat melakukan tugas dan memberi pemahaman untuk bertindak dalam satu komando yang terorganisir. Namun ironisnya upaya pemberdayaan tersebut masih belum mampu menunjukkan penurunan kasus kebakaran hutan dan Lahan yang signifikan.

Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan BPBD kabupaten Ketapang adalah masih kurangnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat khususnya kader dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kurangnya tenaga untuk sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat desa dan pengetahuan aparat pemerintah desa yang rendah tentang pemberdayaan. Selain itu masyarakat masih menganggap remeh dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan maupun pemberian edukasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian oleh Ifrani dan Fathul Achmadi Abby (2022) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito KuaIa (Studi Pembentukan Barisan Pemadam Kebakaran Swadaya Masyarakat di Kota Banjarmasin). Tujuan studi ini adalah untuk menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi BPK swadaya masyarakat desa melalui pengintegrasian dengan Aplikasi “BEKANTAN” Polda Kalsel dalam peran sertanya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian oleh Dimas MauIana Fasya (2017) dengan judul Perancangan Pusat Edukasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Terpadu Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancangan Pusat Edukasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Terpadu yang dapat menjadi sarana pembelajaran untuk masyarakat sebagai wadah untuk menangani kebakaran hutan dan menjadi sarana dalam mencari atau meneliti metode baru dalam menangani kebakaran hutan dan aspek-aspek yang terkena dampaknya.

Penelitian oleh Indra Januar Siregar (2010) dengan judul Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa kondisi udara Kota Pontianak serta zat pencemar yang paling dominan dalam mencemari udara di Kota Pontianak serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa besar dampak dari peristiwa kebakaran hutan dan Lahan di Kalimantan Barat berharap kualitas udara di Kota Pontianak.

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu penulis adalah pemberdayaan yang berbasis edukasi dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Penelitian oleh Ifrani dan FathuI Achmadi Abby (2022) mengambil teknologi aplikasi pelaporan sebagai basis pemberdayaan masyarakatnya yang mana masyarakat ditekankan untuk Lebih memahami aplikasi tersebut agar meningkatkan efektivitas pelaporan sehingga mampu dimanfaatkan sebagai deteksi dini kebakaran hutan dan Lahan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menjadikan edukasi sebagai basis dari pemberdayaannya. Penelitian Dimas MauIana Fasya (2017) menggunakan pendekatan *echo-sustainabIe architecture* sebagai edukasi kepada masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan Lahan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang menjadikan edukasi sebagai media terhadap pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Penelitian Indra Januar Siregar (2010) Studi ini Lebih membahas mengenai dampak Kebakaran Hutan dan Lahan terhadap Kualitas Udara yang mengambil Lokasi penelitian di Kota Pontianak. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang penanganan kebakaran hutan dan Lahan di fokuskan kepada pemberdayaan masyarakat berbasis edukasi.

* 1. **Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan, serta untuk mengetahui upaya yang tepat mengedukasi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ketapang.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan Kualitatif menurut Sugiyono (2017) adalah metode penulisan yang berlandaskan pada filsafat postposivisme, yang dilaksanakan dalam meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang mana penulis sebagai instrument kunci. Penulis mengumpulkan data melalui Penelitian ini menghimpun data setidaknya berdasarkan dua sumber yaitu sumber data primer yang terdiri dari pengumpulan data yang diperoleh dari sumber asli yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini disebut sebagai informan yaitu meliputi Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Staf BPBD kabupaten Ketapang serta masyarakat di di sekitar daerah rawan terjadi Kebakaran hutan dan lahan yaitu Kepala Desa Tempurukan, Kepala Desa Sungai Besar, Kepala Desa Sungai Pelang beserta masyarakat dari ketiga desa tersebut dengan jumlah keseluruhan yang telah diwawancarai berjumlah 13 orang. Data sekunder terdiri dari berbagai sumber yang ada, biasanya berupa data yang disusun dalam bentuk dokumen. Untuk penelitian ini, sumber data sekunder adalah catatan, dan arsip dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ketapang menggunakan teori yang dikemukakan Suharto dalam fokus pemberdayaan yang berisi tentang Kegiatan Terencana dan Kolektif, Memperbaiki Kehidupan Masyarakat, Prioritas Bagi Kelompok Lemah atau Kurang Beruntung, dan Program Peningkatan Kapasitas. Kemudian dalam fokus Edukasi Kebencanaan merujuk kepada Teori yang dikemukakan Fitriani yaitu edukasi adalah Pemberian Pengetahuan dan Kemampuan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

* 1. **Edukasi Kebencanaan**

Edukasi kebencanaan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Tujuan dari edukasi kebencanaan adalah untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif dari bencana serta mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana dengan cepat, efektif, dan aman. Edukasi kebencanaan memiliki dua dimensi yaitu Pemberian Kemampuan dan Pemberian Pengetahuan. Pemberian Kemampuan pada penelitian ini memiliki dua indikator yang telah dilaksanakan BPBD kabupaten Ketapang yaitu Pelatihan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Simulasi Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan. Pemberian Pengetahuan yang pertama dilaksanakan BPBD kabupaten Ketapang yaitu Pembekalan Pengetahuan Seputar Kebakaran Hutan dan Lahan, kegiatan pemberian pengetahuan seputar karhutla tidak hanya dilakukan oleh pihak BPBD namun pihak perusahaan pun ikut andil yang membantu menghimpun masyarakat sekitar perusahaan yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan untuk melakukan sosialisasi dalam kegiatan pemberian pengetahuan tersebut. Kedua yaitu Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang dilakukan BPBD kabupaten Ketapang telah dilaksanakan mulai dari Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Ketiga yaitu Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan diketahui bahwa pembukaan lahan yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten Ketapang adalah pembukaan lahan berbasis kearifan lokal yang dimana kearifan lokal yang dimaksud disini yaitu diwajibkan memiliki izin dari desa, besar lahan yang ingin dibakar sudah ditentukan, terjadwal dan sifatnya gotong royong.

* 1. **Penerapan Prinsip-prinsip Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk menguatkan keberdayaan masyarakat dengan cara membangkitkan kesadaran, membangkitkan dan mendorong motivasi akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan yang penulis aplikasikan memiliki empat poin yaitu kegiatan terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah, dan program peningkatan kapasitas yang mana keempat poin tersebut berkaitan dengan pembahasan yang telah penulis bahas sebelumnya yaitu edukasi kebencanaan.

Kegiatan Terencana dan Kolektif, Pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan di kabupaten Ketapang dalam menangani karhutla salah satunya dengan cara pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di setiap desa oleh BPBD Kabupaten Ketapang. Pembentukkan MPA sendiri diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi darurat bencana karhutla. MPA yang sudah terbentuk terdiri dari 8 desa dari 4 kecamatan yang meliputi kecamatan Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Sandai, dan Kendawangan dengan total 8 MPA. Tujuan MPA dibentuk yaitu pada saat terjadi darurat kebakaran hutan dan lahan di suatu desa yang kemudian MPA tersebut dapat menyampaikan ataupun mengkoordinasikan darurat kebakaran hutan dan lahan tersebut kepada BPBD kabupaten Ketapang yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan personel Tim Reaksi Cepat BPBD kabupaten Ketapang. Memberikan Pemahaman bertindak satu komando terorganisir Bertindak satu komando terorganisir yang dilaksanakan MPA di kabupaten ketapang melaksanakan aksi sesuai arahan dan himbauan yang telah disusun dan diatur dalam satu kesatuan sehingga pergerakan lebih teratur dan efisien.

Prioritas Bagi Kelompok Lemah atau Kurang Mampu Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang mampu memfokuskan pemberdayaan kepada masyarakat yang Lemah dalam hal kapasitas, peralatan standar minimal pemadaman, dan ketanggapan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara mandiri karena kurang siap dalam penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat tersebut diprioritaskan dalam peningkatan ketanggapan dalam menghadapi dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang mampu yang penulis aplikasikan memiliki dua indikator yaitu, Memberikan Peralatan Standar Minimal pemberian alat standar minimal pemadaman kebakaran hutan dan lahan sudah tersalurkan kepada desa-desa yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Alat-alat tersebut sudah dipersiapkan untuk menunjang MPA dalam pengambilan langkah awal pemadaman pada saat darurat kebakaran hutan dan lahan. Menumbuh Kembangkan, Ketanggapan Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan Secara Mandiri Ketanggapan masyarakat dapat mempercepat pendeteksian dini kebakaran. Dengan deteksi dini, maka kesempatan untuk memadamkan api lebih besar dan kemungkinan kerusakan akibat kebakaran menjadi lebih kecil.

Program Peningkatan Kapasitas adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Program Peningkatan Kapasitas yang penulis aplikasikan memiliki dua indikator yaitu Pendampingan Secara Teknis, Pendampingan teknis dapat membantu meningkatkan kapasitas personel dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, pendampingan teknis berfungsi membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yaitu Pelatihan Tata Cara Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, Pelatihan dimulai dengan memberikan pengetahuan dasar tentang karhutla. Pengetahuan dasar tentang karhutla seperti penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat, serta tata cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya adalah teknik pemadaman kebakaran yang berisi tentang teknik-teknik penanganan kebakaran hutan dan lahan, seperti penggunaan alat pemadam kebakaran, teknik memadamkan api, dan cara membangun barrier untuk menghentikan laju api.

Memperbaiki Kehidupan Masyarakat, Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekan kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor manusia sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Pemanfaatan lahan gambut dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan. Lahan gambut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyimpan karbon.

* 1. **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

Faktor pendukung yang penulis temui dalam pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ketapang sebagai berikut, pertama yaitu Kerja Sama BPBD kabupaten Ketapang dengan Perusahaan sekitar daerah rawan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kedua Antusiasme Masyarakat.

Faktor Penghambat, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di kabupaten Ketapang terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Ekonomi Masyarakat yang lemah, masyarakat daerah sekitar rawan kebakaran hutan dan lahan masih dalam kategori ekonomi menengah kebawah, sehingga oknum masyarakat desa tersebut berdalih bahwa membuka lahan dengan cara membakar masih menjadi pilihan terbaik untuk menghemat pengeluaran.

* 1. **Upaya yang Tepat Untuk Mengedukasi Masyarakat**

Berdasar dari hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan penulis Ketika melaksanakan penelitian di BPBD dan beberapa desa di kabupaten Ketapang terkait dengan upaya yang tepat untuk memberdayakan masyarakat dengan mengedukasi masyarakat dalam penanganan Kebakaran hutan dan lahan terdapat beberapa upaya yang menurut penulis tepat untuk dilaksanakan kepada masyarakat desa kabupaten Ketapang, upaya tersebut yaitu Kampanye penyuluhan, pelatihan dan pembinaan, pembuatan materi edukasi, keterlibatan masyarakat, kolaborasi antar pihak, penggunaan teknologi.

* 1. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa berbasis edukasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu upaya yang tepat untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ketapang, namun rendahnya kualitas SDM di desa rawan bencana menjadi salah satu temuan yang menjadi penyebab potensi masyarakat tidak diberdayakan secara optimal, hal ini berkaitan dengan temuan yang ada pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Ifrani dan Fathul Achmadi Abby Minimnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat desa akan tata cara pemadaman kebakaran sehingga potensi masyarakat tidak diberdayakan secara optimal. Selain itu permasalahan krusial yang menyebabkan kabupaten Ketapang menjadi rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu adalah kabupaten Ketapang memiliki wilayah lahan gambut yang luas, seperti halnya temuan dari penelitian yang dilakukan Dimas Maulana Fasya yaitu kebakaran hutan dan Lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik tanah dan faktor penyebab kebakaran yang identik.

1. **KESIMPULAN**

Edukasi kebencanaan di Kabupaten Ketapang melibatkan pemberian pengetahuan dan kemampuan. BPBD Kabupaten Ketapang memberikan pengetahuan tentang karhutla, pencegahan, penanganan, dan tata cara pembukaan lahan. Kemampuan masyarakat ditingkatkan melalui pelatihan dan simulasi pemadaman karhutla. Pemberdayaan masyarakat desa melalui edukasi dilakukan dengan kegiatan terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, memberikan prioritas bagi kelompok lemah, dan program peningkatan kapasitas. Faktor pendukung adalah kerja sama dengan perusahaan dan antusiasme masyarakat, sementara faktor penghambat adalah ekonomi lemah. Upaya yang tepat meliputi kampanye, pelatihan, pembuatan materi edukasi, keterlibatan masyarakat, kolaborasi, dan penggunaan teknologi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa desa yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ketapang.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work).*** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat desa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Ketapang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ketapang beserta jajarannya dan kepala desa Sungai besar, Kepala desa Sungai Pelang, Kepala desa Tempurukan, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Anwas, O. M. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.* Bandung:

 Alfabeta.

Suharto, E. 2009 *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat .*

 Bandung : PT Refika Aditama

Abby, I. d. 2022. Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia. *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan di Desa Hilir Mesjid Kabupaten Barito Kuala*

Fasya, D. M. 2017. *Perancangan Pusat Edukasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Terpadu Provinsi RIau di Kota Pekanbaru*.

Siregar, I. J. 2010. *Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak*

*Dashboard BPBD Ketapang*. (2022, Oktober). Retrieved from Bpbd Ketapang Kalbar: https://bpbdketapangkalbar.com/

*Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang*. (n.d.). Retrieved from https://jdih.kalbarprov.go.id/media/peraturan/2021/pembentukan-organisasi-badan-penanggulangan-bencana-daerah-kabupaten-ketapang.doc